

Atasi Ciliwung, DKI Gandeng Jawa Barat dan KLH

UNTUK menangani tingkat pencemaran sungai, Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Pemprov Jawa Barat dengan membuat program terpadu penanganan sungai. Program terpadu tersebut baru memprioritaskan penanganan Sungai Ciliwung. "Tindak lanjut penanganan Sungai Ciliwung berkoordinasi dengan KLH, yaitu dengan membuat Raperpres (rancangan peraturan presiden)," kata Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta Peni Susanti saat silaturahmi acara Wakil Gubernur dan Kepala Dinas DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/4).

Peni mengatakan, ada empat program besar dalam program terpadu Sungai Ciliwung. Antara lain, program bebas sampah 2012, dan pemberdayaan masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jakarta merilis laporan hasil pemeriksaan (LHP) terkait kinerja BPLHD DKI terhadap efektivitas pengendalian pencemaran air sungai pada tahun anggaran 2009 dan triwulan 1 2010.

Dalam laporan tersebut, BPK menyimpulkan, BPLHD Provinsi DKI Jakarta kurang efektif dalam mengendalikan pencemaran air sungai. Terbukti, sebagian besar sungai di DKI Jakarta dalam kondisi tercemar berat. BPK menyimpulkan, BPLHD DKI Jakarta kurang efektif dalam mengendalikan pencemaran air sungai.

Program pengendalian pencemaran air sungai belum menjadi program utama Pemprov DKI Jakarta sejak 2007-2012. "Akibatnya, tujuan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012, tidak tercapai," kata Kepala BPK Perwakilan Jakarta, Blucer W Rajaguguk dalam laporan tersebut. **Andi**